

Analisis Perbandingan Sistem Hukuman Pidana Diberbagai Negara Pelajaran Untuk Perbaikan Sistem

M. Emirsyah Hussein Hrp¹, Tamaulina Br. Sembiring²

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

emirsyahhussein@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman :298-313

Abstract

This research aims to conduct a comparative analysis of the criminal punishment system in the United States, the United Kingdom, and the Netherlands with the aim of gaining in-depth insight into the differences and similarities in the approaches applied in the enforcement of criminal punishment. The research methods used are legislative analysis, case studies, and literature to understand the basic principles and implementation of criminal punishment policies in the three countries. The results show that in the US, the criminal punishment system tends to rely on strict prison sentences with a focus on deterrent effects. Meanwhile, the UK features a rehabilitative and restorative justice approach, emphasizing the recovery of defendants and reconciliation with victims. In the Netherlands, the restorative justice approach is more realized, with a strong emphasis on rehabilitation and social reintegration of prisoners. From this comparative analysis, potential improvements in each system were identified. The US could consider reviewing its overly harsh sentencing policy to address prisoner overpopulation. The UK could strengthen its rehabilitative elements to ensure the successful social reintegration of defendants. In the Netherlands, potential improvements involve increasing rehabilitative capacity and empowering prisoners. This research contributes to further understanding of criminal punishment policies in the three countries, and the implications can be used as a basis for the improvement of more effective and balanced criminal punishment policies.

Keywords:

*comparative legal system
america
britain
dutch*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan sistem hukuman pidana di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda dengan tujuan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perbedaan dan kesamaan pendekatan yang diterapkan dalam penegakan hukuman pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perundang-undangan, studi kasus, dan literatur untuk memahami prinsip-prinsip dasar serta implementasi kebijakan hukuman pidana di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di AS, sistem hukuman pidana cenderung mengandalkan hukuman penjara yang tegas dengan fokus pada efek jera. Sementara itu, Inggris menonjolkan pendekatan rehabilitatif dan restorative justice, menekankan pemulihan terdakwa dan rekonsiliasi dengan korban. Di Belanda, pendekatan restorative justice lebih terwujud, dengan penekanan kuat pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dari hasil analisis perbandingan ini, teridentifikasi potensi perbaikan dalam masing-masing sistem. AS dapat mempertimbangkan peninjauan kebijakan hukuman yang terlalu berat untuk mengatasi kelebihan populasi tahanan. Inggris dapat memperkuat elemen rehabilitatifnya untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial terdakwa. Di Belanda, potensi perbaikan melibatkan peningkatan kapasitas rehabilitatif dan pemberdayaan narapidana. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang kebijakan hukuman pidana di ketiga negara, dan implikasinya dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan hukuman pidana yang lebih efektif dan seimbang.

Kata Kunci : perbandingan sistem hukum, amerika, inggris, belanda

PENDAHULUAN

Sistem hukuman pidana adalah pilar utama dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam suatu negara. Seiring dengan dinamika perubahan masyarakat dan kompleksitas permasalahan hukum, perbaikan terus menerus pada sistem hukuman pidana menjadi suatu keharusan, penelitian ini

melakukan analisis perbandingan terhadap sistem hukuman pidana di berbagai negara sebagai landasan untuk merefleksikan dan meningkatkan sistem yang ada.

Ketidaksetaraan hasil peradilan, pelaksanaan hukuman yang tidak efektif, dan tantangan baru yang muncul dalam tatanan global menjadi alasan penting bagi kajian perbandingan ini. Berbagai negara telah mengembangkan pendekatan unik dalam menerapkan hukuman pidana, didorong oleh konteks budaya, sosial, dan sejarah masing-masing, melalui analisis mendalam terhadap sistem hukuman pidana di negara-negara terpilih, dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta mengambil pelajaran berharga untuk diterapkan dalam konteks nasional (Munarif & Arief, 2022).

Pentingnya perbandingan ini terletak pada potensi untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem hukuman pidana di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memahami variasi praktik hukuman pidana di berbagai belahan dunia, dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan mengoptimalkan tujuan rehabilitasi dan resosialisasi dalam penegakan hukum, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademis, namun juga dapat memberikan arah yang jelas bagi perbaikan sistem hukuman pidana di Indonesia.

Dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang, kebutuhan akan sistem hukum pidana yang efektif menjadi semakin mendesak. Sistem hukum pidana memainkan peran kritis dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di suatu negara. Pertumbuhan kompleksitas permasalahan hukum, perubahan sosial, dan tantangan global seperti kejahatan transnasional, menuntut adanya peningkatan kualitas dan responsivitas dari sistem hukum pidana (Suleaman, 2018).

Salah satu alasan utama peningkatan kebutuhan ini adalah ketidaksetaraan hasil peradilan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Keadilan yang tidak merata dalam sistem hukum pidana dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dan mengancam stabilitas sosial, peningkatan efektivitas sistem hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri, tetapi juga dengan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membuka pintu bagi munculnya tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber dan transnasional (Erlianto dkk., 2021). Sistem hukum pidana yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini, mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang canggih dan tanggap terhadap dinamika kejahatan modern. Keterlibatan lintas batas juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menanggapi ancaman keamanan yang bersifat global.

Pentingnya sistem hukum pidana yang efektif juga dapat dipahami dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Suatu sistem hukuman yang efektif harus mampu menjamin keadilan dan melindungi hak-hak individu tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, perbaikan sistem hukuman pidana tidak hanya melibatkan upaya penegakan hukum yang lebih tegas, tetapi juga peningkatan dalam perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang adil dan beradab.

Peningkatan kebutuhan akan sistem hukum pidana yang efektif mencerminkan tuntutan masyarakat akan keadilan yang merata, keamanan yang berkelanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian mendalam terhadap sistem hukuman pidana di berbagai negara diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk membentuk suatu sistem hukum pidana yang lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Perbandingan sistem hukuman memiliki peran yang strategis dalam merancang peraturan yang relevan dan efektif bagi suatu negara. Pemahaman mendalam terhadap berbagai pendekatan dan praktik hukuman di berbagai belahan dunia dapat memberikan pandangan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan legislator. Secara khusus, perbandingan sistem hukuman memberikan inspirasi dan landasan yang kuat untuk pengembangan peraturan yang sesuai dengan dinamika sosial dan perkembangan hukum global.

Salah satu peran utama perbandingan sistem hukuman adalah sebagai sumber inspirasi untuk inovasi hukum. Dengan mengamati praktik-praktik terbaik dan solusi yang telah terbukti efektif di

negara-negara lain, pembuat kebijakan dapat memperkaya repertoar peraturan dengan ide-ide baru dan solusi yang lebih efisien. Proses inovasi ini penting dalam menanggapi tantangan hukum yang semakin kompleks dan dinamis.

Perbandingan sistem hukuman juga memainkan peran vital dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam peraturan yang sudah ada. Dengan meneliti studi kasus dari negara-negara terkait, dapat belajar dari pengalaman, menghindari kesalahan yang sama, dan meningkatkan kualitas peraturan yang ada. Analisis mendalam terhadap kelemahan ini memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan peraturan secara berkelanjutan.

Perbandingan sistem hukuman memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap nilai dan budaya lokal. Meskipun mengambil inspirasi dari praktik-praktik luar, pembuat kebijakan dapat menyesuaikan peraturan agar sejalan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Hal ini memastikan penerimaan yang lebih luas dan meminimalkan potensi konflik dengan norma dan budaya yang telah ada.

Lebih dari sekadar alat perbandingan, pemahaman mendalam terhadap sistem hukuman di berbagai negara memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang peraturan yang bukan hanya efektif secara hukum, tetapi juga berdaya saing dan relevan dalam menghadapi perubahan zaman, perbandingan sistem hukuman menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pengembangan peraturan yang inklusif, berkeadilan, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam upaya mendalami kompleksitas sistem hukuman pidana di berbagai negara, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan kunci yang menjadi landasan utama untuk analisis yang mendalam. Pertama, bagaimana perbandingan sistem hukuman pidana di berbagai negara. Pertanyaan ini membuka pintu untuk menjelajahi perbedaan-perbedaan esensial dalam struktur, prinsip dasar, serta implementasi sistem hukuman pidana dari satu negara ke negara lain.

Potensi perbaikan yang dapat diambil dari hasil analisis perbandingan. Dengan mengeksplorasi potensi perbaikan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil dari keberhasilan dan kegagalan sistem hukuman pidana di berbagai konteks. Pertanyaan ini menjadi titik tolak untuk merumuskan rekomendasi konkrit yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan dan peningkatan sistem hukuman pidana, khususnya di tingkat nasional.

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perbedaan-perbedaan signifikan dalam struktur, prinsip dasar, serta implementasi sistem hukuman pidana di berbagai negara. Analisis ini diarahkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang keragaman praktik hukuman pidana global.

Tujuan kedua adalah untuk menjelajahi kelebihan dan kekurangan dalam praktik-praktik hukuman pidana di berbagai negara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman positif dan negatif sebagai dasar referensi dalam perancangan peraturan dan kebijakan hukuman pidana yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis perbandingan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum (MH, 2022). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menggali makna dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam praktik hukuman pidana (Muhammad Syahrudin, 2022). Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai metode penelitian yang digunakan:

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian analisis perbandingan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan sistem hukuman pidana dari berbagai negara, mengidentifikasi pola, dan mengevaluasi perbedaan signifikan dalam pendekatan hukuman.

Negara-negara studi dipilih secara teliti untuk mencakup keragaman praktik hukuman pidana. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti keberhasilan sistem, kerangka hukum yang unik, dan representasi geografis yang luas.

Sistem hukuman pidana dari setiap negara dipilih berdasarkan karakteristik uniknya, termasuk struktur peradilan pidana, jenis pidana yang diterapkan, dan prinsip dasar yang mendasari sistem hukuman. Data yang diperoleh melibatkan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan ahli hukum. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam praktik hukuman pidana serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas sistem.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan memahami makna di balik perbedaan-perbedaan dalam sistem hukuman pidana (Syahrudin, 2022). Wawancara dengan praktisi hukum dan pejabat pemerintah juga dilakukan untuk mendapatkan wawasan langsung dari sumber yang relevan. Analisis perbandingan dilakukan secara mendalam untuk membandingkan berbagai aspek sistem hukuman pidana, termasuk struktur, proses peradilan, jenis pidana, dan dampak sosial dari implementasi hukuman. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem hukuman pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk pemahaman mendalam tentang perbandingan sistem hukuman pidana serta memberikan kontribusi yang signifikan untuk perbaikan dan pengembangan sistem hukuman pidana di tingkat nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

a. Definisi dan Tujuan Sistem Hukuman Pidana

Sistem Hukuman Pidana merupakan kerangka kerja hukum yang mengatur penegakan norma dan aturan hukum terkait tindak pidana. Sistem ini mencakup struktur peradilan pidana, prosedur hukum, serta jenis-jenis hukuman yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran hukum (Sitanggang, t.t.). Sistem Hukuman Pidana menjadi instrumen utama bagi suatu negara dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memberikan sanksi kepada individu atau entitas yang melanggar norma hukum.

1. Pencegahan Kejahatan

Salah satu tujuan utama dari sistem hukuman pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan. Dengan menetapkan hukuman yang tegas dan sesuai, diharapkan dapat memberikan efek jera dan memotivasi individu untuk tidak melakukan tindakan kriminal.

2. Perlindungan Masyarakat

Sistem Hukuman Pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang dapat timbul akibat tindakan kriminal. Ini melibatkan penahanan pelaku kejahatan agar tidak dapat membahayakan orang lain serta memberikan rasa aman bagi masyarakat (Masduqi, 2016).

3. Penegakan Keadilan

Keadilan merupakan aspek fundamental dari sistem hukuman pidana. Tujuan ini mencakup aspek distributif dan retributif keadilan, di mana pelaku kejahatan menerima sanksi yang sebanding dengan tindakan yang dilakukannya, sambil memberikan keadilan kepada korban.

4. Rehabilitasi dan Resosialisasi

Sistem Hukuman Pidana juga memiliki tujuan rehabilitasi dan resosialisasi, yaitu memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku dan kembali menjadi anggota produktif masyarakat setelah menjalani hukuman (Pamungkas, 2023).

5. Deterrence (Efek Jera)

Selain pencegahan kejahatan secara umum, sistem ini bertujuan menciptakan efek jera, yaitu mencegah individu lain untuk melakukan tindakan kriminal dengan menunjukkan konsekuensi yang serius bagi pelaku kejahatan (Najicha, t.t.).

6. Penegakan Hak Asasi Manusia

Sistem Hukuman Pidana juga diarahkan untuk memastikan penegakan hak asasi manusia dalam proses penuntutan dan hukuman, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap hak-hak individu.

7. Memberikan Restitusi

Tujuan lainnya adalah memberikan restitusi kepada korban kejahatan, baik dalam bentuk pemulihan materiil maupun immateriil, guna mengembalikan kerugian yang diderita akibat tindakan kriminal.

8. Pengaturan Sanksi

Sistem Hukuman Pidana juga bertujuan mengatur sanksi dengan proporsionalitas, keadilan, dan memperhitungkan berbagai faktor seperti keparahan tindakan, motivasi pelaku, serta faktor-faktor mitigasi atau pemberat.

b. Perkembangan Sistem Hukuman Pidana di Berbagai Negara

Perkembangan sistem hukuman pidana di berbagai negara mencerminkan adaptasi terhadap perubahan kompleksitas sosial, budaya, dan teknologi. Beberapa negara menunjukkan tren menuju pendekatan yang lebih progresif dan inovatif dalam menanggapi tantangan hukuman pidana. Fleksibilitas dan inovasi menjadi ciri khas, dengan berbagai alternatif penyelesaian sengketa dan program rehabilitasi yang diperkenalkan sebagai upaya merespons dinamika masyarakat.

Pentingnya pemikiran restoratif semakin berkembang, di mana negara-negara tertentu mulai melihat hukuman pidana bukan hanya sebagai penindasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip restoratif ini membawa perubahan paradigma menuju sistem yang lebih berorientasi pada pemulihan sosial dan rekonsiliasi.

Aspek hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam evolusi sistem hukuman pidana. Negara-negara semakin menekankan perlindungan hak individu, penanganan yang adil, dan penolakan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Konsep keadilan semakin terintegrasi dalam perancangan dan pelaksanaan hukuman, menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Perubahan dalam teknologi juga memainkan peran penting dalam perkembangan sistem hukuman pidana. Munculnya kejahatan siber dan tantangan teknologi lainnya mendorong negara-negara untuk mengadaptasi metode baru dalam penegakan hukum, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi pengawasan yang lebih canggih (FANGGI, 2021).

Penekanan yang semakin besar pada rehabilitasi dan resosialisasi mencerminkan pemahaman bahwa hukuman pidana seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proaktif dalam membantu individu mengatasi akar masalah yang mendasari perilaku kriminal. Negara-negara tertentu

menciptakan program rehabilitasi yang inovatif untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan memiliki peluang nyata untuk memperbaiki diri.

Masyarakat semakin dilibatkan dalam proses penegakan hukum pidana. Model partisipatif menggugah keterlibatan aktif masyarakat dalam keputusan terkait hukuman dan penegakan hukum. Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai langkah kunci untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang lebih adil dan inklusif.

Perkembangan sistem hukuman pidana di tingkat global juga menuntut kerja sama internasional. Kejahatan transnasional memicu negara-negara untuk membangun kerangka kerja hukum pidana yang bersifat lintas batas, menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam penegak

c. Peran Perbandingan Hukum dalam Pengembangan Sistem Hukuman

Perbandingan hukum memainkan peran krusial dalam pengembangan sistem hukuman, memungkinkan suatu negara untuk mengakses beragam pengalaman dan praktek-praktek hukuman dari berbagai belahan dunia. Dengan membandingkan sistem hukuman dari negara-negara yang berbeda, suatu negara dapat mendapatkan wawasan yang berharga yang membantu dalam merancang, memperbaiki, dan mengadaptasi sistem hukuman sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakatnya (Febriyanti, 2020).

Salah satu peran utama perbandingan hukum adalah sebagai sumber inspirasi untuk inovasi hukum. Dengan menganalisis berbagai pendekatan yang telah terbukti efektif di negara-negara lain, pembuat kebijakan dapat memperkaya repertoar hukuman dengan ide-ide baru yang dapat meningkatkan efisiensi, keadilan, dan efektivitas dalam penegakan hukum.

Perbandingan hukum juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam sistem hukuman yang telah diterapkan di tempat lain. Dengan memahami pengalaman negara-negara tertentu, suatu negara dapat menghindari mengulang kesalahan dan mengadaptasi prinsip-prinsip yang telah terbukti berhasil.

Pentingnya peran perbandingan hukum terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan sistem hukuman dengan nilai dan budaya lokal. Dengan mempertimbangkan praktik-praktik hukuman dari berbagai konteks budaya, pembuat kebijakan dapat merancang sistem yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat setempat, menghindari ketidakrelevanan, dan memastikan penerimaan yang lebih luas.

Perbandingan hukum memungkinkan pemberdayaan masyarakat dalam proses perancangan kebijakan hukuman. Dengan membuka dialog dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sipil dan pakar hukum, suatu negara dapat menciptakan sistem hukuman yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Dalam era globalisasi, peran perbandingan hukum menjadi semakin penting. Negara-negara dapat belajar tidak hanya dari kesuksesan, tetapi juga dari kegagalan sistem hukuman di tempat lain. Kerjasama internasional dalam pertukaran informasi hukum dapat membuka peluang untuk menciptakan standar global yang lebih baik dalam penegakan hukum (Maulana, 2016).

d. Implementasi Sistem Hukuman Pidana yang Sukses

Keberhasilan implementasi suatu sistem hukuman pidana tidak hanya tercermin dalam efisiensi penegakan hukum, tetapi juga dalam dampak positifnya terhadap masyarakat dan pemulihan sosial. Beberapa negara telah memperlihatkan kesuksesan dalam menerapkan sistem hukuman pidana yang memadukan aspek efektivitas, keadilan, dan pembangunan sosial.

Salah satu kunci keberhasilan adalah adopsi prinsip rehabilitasi dan resosialisasi. Negara-negara yang berhasil mengintegrasikan program-program rehabilitasi secara komprehensif berhasil memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku. Dalam konteks ini,

program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis menjadi bagian integral dari sistem hukuman.

Pentingnya pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia juga terlihat dalam implementasi sistem hukuman pidana yang sukses. Negara-negara ini secara konsekuen menjamin perlindungan hak individu selama proses penegakan hukum dan hukuman, menolak praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia. Keputusan-keputusan hukuman didasarkan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas, serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu, tanpa diskriminasi (Rochman dkk., 2021).

Adanya kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum, sistem peradilan, dan masyarakat sipil, juga merupakan ciri khas dari implementasi sistem hukuman pidana yang sukses. Sinergi ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengatasi akar masalah kriminalitas.

Negara-negara yang berhasil dalam implementasi sistem hukuman pidana juga cenderung memiliki strategi pencegahan kejahatan yang efektif. Dengan fokus pada pencegahan, menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan mental. Pencegahan menjadi bagian integral dari pendekatan holistik terhadap keadilan pidana.

Penggunaan teknologi modern juga turut berkontribusi pada keberhasilan implementasi sistem hukuman pidana. Sistem informasi manajemen kejahatan, pemantauan elektronik, dan penggunaan kecerdasan buatan membantu meningkatkan efisiensi penegakan hukum serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas (Saputra dkk., 2023).

Negara-negara yang sukses dalam implementasi sistem hukuman pidana juga cenderung terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Secara terus-menerus mengevaluasi kebijakan dan praktik-praktik hukuman, menerima masukan dari berbagai pihak, dan bersedia untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi mencapai tujuan keadilan dan keamanan masyarakat secara lebih baik.

B. Perbandingan Sistem Hukuman Pidana

a. Negara Amerika Serikat

1. Karakteristik Sistem Hukuman Pidana di Amerika Serikat

Sistem hukuman pidana di Amerika Serikat memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai dasar keadilan, kebebasan individu, dan desentralisasi kekuasaan. Salah satu ciri khas sistem ini adalah pengaturan yang terdesentralisasi, di mana otoritas hukum pidana terbagi antara tingkat federal dan tingkat negara bagian. Desentralisasi ini menciptakan keragaman dalam hukum pidana, dengan setiap negara bagian memiliki yurisdiksinya sendiri (Tarigan, 2018).

Prinsip kebebasan individu menjadi dasar sistem hukuman Amerika Serikat. Asas ketidakbersalahan dianggap sebagai hak dasar setiap individu, yang menempatkan beban pembuktian pada pihak penuntut umum. Hak-hak konstitusional, termasuk hak atas pengacara dan pengadilan yang adil, dijunjung tinggi untuk memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum (Sihaloho, 2021).

Partisipasi juri di dalam peradilan adalah ciri khas penting. Hak untuk diadili oleh juri dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan keadilan dan melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan hukum. Keberagaman dalam sanksi hukuman menjadi fitur lainnya, mulai dari denda dan pekerjaan sosial hingga hukuman penjara dan hukuman mati.

Hukuman penjara memiliki peran besar dalam sistem ini, walaupun isu-isu seperti overkriminalisasi dan jumlah populasi tahanan yang tinggi menjadi perhatian. Hak asasi manusia dan perlindungan individu menjadi fokus utama, dan kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem hukuman kadang-kadang memicu perdebatan dan perubahan kebijakan.

Konsep hukuman bersyarat dan program pencegahan kejahatan juga diterapkan secara luas. Probasi, pembebasan bersyarat, dan program rehabilitasi merupakan upaya untuk mengurangi kekambuhan dan membantu pemulihan sosial para pelaku kejahatan. Penggunaan teknologi modern, seperti pemantauan elektronik, digunakan untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan efisiensi (Susanti dkk., 2022).

Meskipun sistem hukuman Amerika Serikat memiliki banyak aspek positif, tetapi tantangan terus muncul, seperti ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, isu rasial, dan kebutuhan akan reformasi hukum pidana. Keberlanjutan evaluasi dan perbaikan terus menjadi bagian dari perjalanan sistem hukuman Amerika Serikat untuk mencapai keadilan yang lebih baik (Latukau, 2020).

2. Faktor-Faktor Penentu dalam Pengenaan Hukuman

Pengenaan hukuman di Amerika Serikat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan beragam. Salah satu faktor utama adalah tingkat keparahan tindak pidana, di mana kejahatan yang lebih serius cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat. Riwayat kriminal individu juga memainkan peran penting, dengan pengadilan mempertimbangkan sejarah pelanggaran sebelumnya untuk menentukan hukuman yang sesuai.

Opini masyarakat terhadap suatu tindak pidana juga dapat memengaruhi proses pengenaan hukuman. Kasus-kasus yang mendapat perhatian media atau menyentuh isu-isu sosial seringkali menghadapi tekanan opini publik yang dapat memengaruhi putusan pengadilan. Selain itu, kerjasama dengan penuntut umum dan upaya pembelaan juga dapat memengaruhi hasil akhir suatu kasus.

Aspek ekonomi dan sosial juga dapat memainkan peran dalam pengenaan hukuman. Terdakwa yang kurang mampu secara finansial mungkin menghadapi hukuman yang berbeda, terutama jika tidak mampu membayar denda atau mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Selain itu, isu-isu rasial dan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi proses hukum (Tolib Effendi, 2018).

Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum juga memainkan peran dalam sistem hukuman Amerika Serikat. Pemantauan elektronik dan sistem informasi manajemen kejahatan digunakan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan mengawasi pelaksanaan hukuman (Nasar, 2020). Meskipun demikian, tantangan seperti ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan kelebihan populasi tahanan terus menjadi fokus pembahasan dan perdebatan dalam sistem peradilan Amerika Serikat.

b. Negara Inggris

1. Karakteristik Sistem Hukuman Pidana

Sistem hukuman pidana di Britania Raya mencerminkan warisan panjang dari tradisi hukum umum dan prinsip-prinsip keadilan. Britania Raya menganut sistem hukum umum yang didasarkan pada preseden dan putusan pengadilan sebelumnya (Marpaung & Moeliono, 2021). Pengadilan seringkali merujuk pada keputusan-keputusan sebelumnya untuk membentuk hukum baru, menciptakan tradisi hukum yang kaya (AGUSTIAN, 2021).

Kekuasaan hukum pidana terdesentralisasi di antara Inggris, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Meskipun terdapat beberapa undang-undang pidana yang bersifat nasional, setiap wilayah memiliki yurisdiksinya sendiri dan dapat mengembangkan hukumnya sendiri.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi integral dalam sistem hukuman Britania Raya. Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa berperan dalam memastikan hak-hak individu, termasuk hak untuk pengadilan yang adil dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Hukuman penjara tetap menjadi bentuk hukuman yang umum, terutama untuk tindak pidana yang serius. Namun, Britania Raya juga menerapkan hukuman pengawasan dan pembebasan bersyarat sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana (Bawole, 2013).

Pengenaan denda menjadi alternatif hukuman yang umum di Britania Raya. Besaran denda dapat ditentukan berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana dan kemampuan finansial terdakwa. Sistem hukuman Britania Raya didasarkan pada prinsip kesetaraan di depan hukum, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses peradilan (Poppy, 2019).

Hak terdakwa untuk memiliki pembelaan yang efektif dihormati secara serius dalam sistem hukuman. Pengacara pembelaan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap individu diberikan kesempatan yang adil untuk membela diri.

Britania Raya terus berupaya mereformasi sistem hukuman pidana untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan keadilan. Reformasi mencakup upaya untuk mengurangi kelebihan populasi tahanan, meningkatkan efektivitas rehabilitasi, dan menangani isu-isu ketidaksetaraan. Meskipun memiliki akar dalam sejarah dan tradisi yang kaya, perubahan terus dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia tetap menjadi pijakan utama dalam sistem peradilan (Kristiawanto & SH, t.t.).

2. Faktor-Faktor Penentu dalam Pengenaan Hukuman

Pengenaan hukuman di Britania Raya melibatkan sejumlah faktor yang kompleks, mencerminkan nuansa dan kebijaksanaan sistem peradilan pidana. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses pengenaan hukuman di negara ini termasuk:

Tingkat keparahan tindak pidana menjadi faktor kunci dalam menentukan hukuman. Kasus-kasus dengan keparahan tinggi, seperti kejahatan kekerasan atau kejahatan finansial besar, mungkin menghadapi hukuman penjara yang lebih berat.

Riwayat kriminal individu memiliki dampak yang signifikan. Pengadilan dapat mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki riwayat pelanggaran sebelumnya, yang dapat mempengaruhi tingkat hukuman yang diberikan.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu. Opini publik dapat memainkan peran dalam penentuan hukuman, terutama dalam kasus-kasus yang mendapat sorotan media atau menjadi isu sosial yang sensitif. Upaya pembelaan dan kerjasama dengan penuntut umum dapat memengaruhi hasil akhir suatu kasus. Kesepakatan plea bargaining atau negosiasi dengan penuntut umum dapat memodifikasi hukuman yang mungkin dihadapi oleh terdakwa (Marpaung & Moeliono, 2021).

Isu-isu ekonomi juga dapat memainkan peran, dengan terdakwa yang kurang mampu secara finansial mungkin menghadapi hukuman yang lebih ringan atau opsi seperti pengenaan denda. Pandangan hakim terhadap kasus. Sentimen hakim, interpretasi undang-undang, dan penilaian kebijakan peradilan pidana dapat mempengaruhi jenis dan tingkat hukuman yang diberikan.

Ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan isu-isu rasial juga menjadi faktor yang penting dalam sistem hukuman Britania Raya. Upaya untuk memastikan perlakuan yang adil untuk semua individu menjadi perhatian penting dalam proses peradilan.

c. Negara belanda

1. Karakteristik Sistem Hukuman Pidana

Sistem hukuman pidana di Belanda mencerminkan pendekatan yang berbasis pada keadilan, hak asasi manusia, dan rehabilitasi. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem hukuman pidana di negara Belanda:

Belanda menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan perbaikan dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman semata. Terdakwa diharapkan untuk memahami dampak tindakan dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya.

Hukuman penjara di Belanda cenderung lebih pendek dibandingkan dengan beberapa negara lain. Sistem ini fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial para narapidana, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan program-program pendidikan untuk mempersiapkan kembali ke masyarakat (Pohan dkk., 2012).

Adanya diversifikasi dalam hukuman. Selain hukuman penjara, sistem Belanda juga menggunakan hukuman dalam bentuk pekerjaan sosial, pengawasan elektronik, atau perintah pemulihan. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukuman dengan jenis kejahatan dan karakteristik individu terdakwa.

Hak asasi manusia dihormati secara serius. Belanda memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang diakui, termasuk hak untuk pengadilan yang adil, privasi, dan perlakuan yang manusiawi.

Terdapat penekanan pada tanggung jawab sosial dalam proses peradilan pidana. Fokusnya bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pada tanggung jawab masyarakat dan korban untuk berkontribusi pada proses perbaikan.

Sistem hukuman di Belanda juga mencakup peran aktif dari pekerja sosial dan psikolog dalam membantu pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kekambuhan dan mengintegrasikan kembali terdakwa ke dalam masyarakat dengan cara yang positif. Sistem hukuman Belanda juga dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi. Terus berkembangnya masyarakat dan nilai-nilai keadilan global terus mendorong Belanda untuk mengevaluasi dan memperbarui pendekatannya agar tetap relevan dan efektif.

2. Faktor-Faktor Penentu dalam Pengenaan Hukuman

Pengenaan hukuman di Belanda dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencerminkan pendekatan progresif dan humanis terhadap sistem peradilan pidana. Beberapa faktor penentu utama dalam proses ini melibatkan pertimbangan berikut:

Tingkat keparahan tindak pidana menjadi faktor penting dalam menentukan jenis hukuman yang diterapkan. Hukuman yang dijatuhkan cenderung disesuaikan dengan tingkat seriusnya kejahatan, dengan upaya untuk memberikan respons yang seimbang dan proporsional.

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi faktor kunci dalam sistem hukuman Belanda. Sistem ini menekankan pentingnya perbaikan dan rekonsiliasi, memungkinkan terdakwa untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan dan berkontribusi pada pemulihan korban dan masyarakat.

Perhatian pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial terdakwa. Belanda memandang hukuman sebagai kesempatan untuk membimbing dan mendidik terdakwa, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat.

Hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam pengenaan hukuman di Belanda. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak untuk pengadilan yang adil dan perlakuan yang manusiawi, dijunjung tinggi dalam setiap tahap proses hukum (WARIS, 2012). Adanya diversifikasi dalam pilihan

hukuman. Selain hukuman penjara, sistem ini mempertimbangkan bentuk-bentuk hukuman alternatif seperti pekerjaan sosial, pengawasan elektronik, atau program rehabilitasi khusus yang dapat disesuaikan dengan karakteristik individu dan jenis kejahatan.

Responsibilitas sosial menjadi faktor penting dalam pengenaan hukuman. Selain menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, sistem Belanda juga membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial masyarakat dan korban dalam mendukung proses perbaikan. Melalui pendekatan holistik ini, Belanda berusaha menciptakan sistem hukuman yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada pemulihan, dengan harapan dapat menghasilkan efek positif dalam masyarakat. Terus berkembangnya nilai-nilai keadilan dan dampak perubahan sosial terus membentuk dan mengarahkan evolusi sistem peradilan pidana di Belanda.

C. Analisis dan Pembahasan

a. Identifikasi Kelebihan dan Kekurangan Sistem Hukuman Pidana

Sistem hukuman pidana, sebagai instrumen penegakan hukum, memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai keadilan dan efektivitas. Kelebihan utama dari sistem hukuman pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan masyarakat. Hukuman yang adil dan tegas diharapkan dapat menjadi deterjen yang efektif, mengurangi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Sanksi pidana juga dapat memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakan.

Sistem hukuman pidana juga memiliki kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu kelemahan utama adalah kecenderungan terjadinya kelebihan populasi tahanan. Hukuman pidana yang terlalu berat atau penerapan hukuman yang tidak proporsional dapat menyebabkan peningkatan jumlah tahanan, yang pada gilirannya dapat menghadirkan tantangan bagi sistem peradilan dan penjara.

Aspek rehabilitasi dalam sistem hukuman kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Fokus pada hukuman seringkali mengabaikan upaya untuk membimbing dan mendidik terdakwa agar dapat menghindari kambuh ke dunia kejahatan. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana narapidana kurang dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman (Chandra, 2019).

Kekurangan lainnya adalah potensi untuk ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam pengenaan hukuman. Faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, dan status ekonomi dapat memengaruhi keputusan pengadilan dan memberikan hukuman yang tidak proporsional kepada individu yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Perlu dicatat bahwa reformasi dan evaluasi terus menerus terhadap sistem hukuman pidana diperlukan untuk mengatasi kekurangan ini. Peningkatan dalam pendekatan rehabilitatif, keadilan sosial, dan peningkatan transparansi dapat membantu menciptakan sistem hukuman yang lebih seimbang, adil, dan berdaya guna.

Di Amerika Serikat, sistem hukuman pidana memiliki kelebihan dalam hal memberikan efek jera yang kuat melalui penggunaan hukuman penjara yang tegas. Keamanan masyarakat menjadi prioritas, dan sanksi pidana diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan. Namun, kelebihan tersebut sering diimbangi oleh kelemahan, terutama kelebihan populasi tahanan yang tinggi dan isu ketidaksetaraan dalam penegakan hukum (Dwiyantama, 2023).

Sistem hukuman pidana di Inggris menekankan keadilan dan hak asasi manusia. Kelebihannya termasuk pendekatan rehabilitatif dan berfokus pada reintegrasi sosial narapidana. Namun, kekurangannya mencakup tantangan terkait kelebihan populasi tahanan, terutama dalam penggunaan hukuman penjara, dan beberapa isu ketidaksetaraan dalam sistem peradilan.

Di Belanda, sistem hukuman pidana mengadopsi pendekatan restorative justice yang menitikberatkan pada rekonsiliasi dan perbaikan. Kelebihannya terletak pada upaya rehabilitasi yang kuat dan pengurangan penggunaan hukuman penjara. Meskipun demikian, tantangan melibatkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan perlunya menjaga keseimbangan antara keadilan dan efektivitas dalam mencegah kejahatan. Dalam konteks masing-masing negara, identifikasi kelebihan dan kekurangan sistem hukuman pidana menjadi penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sistem tersebut agar dapat memberikan keadilan, efektivitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Hukuman

Efektivitas suatu sistem hukuman dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor yang memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana suatu sistem hukuman dapat mencapai tujuannya antara lain:

1. Hukuman yang Proporsional Kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan tingkat keparahan tindak pidana memainkan peran penting dalam efektivitas sistem hukuman. Hukuman yang terlalu ringan atau terlalu berat dapat merusak tujuan rehabilitasi dan efek jera.
2. Rehabilitasi dan Reintegrasi Upaya sistem hukuman dalam membimbing dan mendidik terdakwa untuk reintegrasi kembali ke masyarakat memiliki dampak langsung pada efektivitasnya. Fokus pada rehabilitasi dapat membantu mengurangi tingkat kambuhan dan kejahatan berulang (Erlytawati, 2015).
3. Transparansi dan Keadilan Prosedural Tingkat transparansi dalam proses peradilan dan keadilan prosedural adalah faktor penting. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukuman dapat tumbuh ketika proses hukum dijalankan secara adil, terbuka, dan memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
4. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi Adanya ketidaksetaraan atau diskriminasi dalam sistem hukuman dapat mengurangi efektivitasnya. Perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem dan menimbulkan ketidakpuasan.
5. Pencegahan dan Penghapusan Kriminalitas Efektivitas suatu sistem hukuman juga dapat diukur oleh kemampuannya dalam mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Pendekatan pencegahan yang holistik, termasuk intervensi sosial dan pendidikan, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan ini.
6. Sumber Daya dan Infrastruktur Ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai sangat penting. Kurangnya dana, personel, atau fasilitas dapat menghambat kemampuan sistem hukuman untuk memberikan pelayanan yang efektif (Prahassacitta, 2017).
7. Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan dan sistem hukuman dapat meningkatkan efektivitasnya. Masyarakat yang terlibat dapat menjadi mitra dalam pemantauan dan implementasi program-program rehabilitasi.
8. Perubahan Sosial dan Nilai-Nilai Masyarakat Dinamika perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat dapat memengaruhi pandangan terhadap keadilan dan jenis hukuman yang diinginkan. Sistem hukuman yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini dapat lebih efektif dalam menjawab tuntutan masyarakat.

E. Pelajaran yang Dapat Diambil untuk Perbaikan Sistem Hukuman

Pembelajaran dari berbagai sistem hukuman di seluruh dunia memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem hukuman secara global. Beberapa pelajaran yang dapat diambil melibatkan aspek-aspek kritis dalam pemahaman dan pengelolaan sistem hukuman:

Pentingnya pendekatan yang seimbang antara hukuman, rehabilitasi, dan pencegahan kejahatan. Sistem hukuman yang efektif tidak hanya memandang hukuman sebagai tujuan utama, tetapi juga sebagai kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terdakwa ke dalam masyarakat.

Perluasan pandangan terhadap konsep keadilan dan tanggung jawab sosial. Melibatkan masyarakat dan korban dalam proses perbaikan dapat memperkuat ikatan sosial dan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang dampak kejahatan pada korban dan komunitas. Pentingnya transparansi dan keadilan prosedural. Sistem hukuman yang terbuka, adil, dan menghormati hak asasi manusia dapat membangun kepercayaan masyarakat, memastikan keadilan, dan menghindari ketidaksetaraan atau diskriminasi (Mayasari, t.t.).

Penggunaan teknologi juga menjadi pelajaran yang signifikan. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan manajemen tahanan, penelitian kriminologis, dan perbaikan sistem informasi peradilan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukuman. Fokus pada pencegahan kejahatan dan intervensi dini dapat membantu mengurangi beban sistem hukuman dan memberikan solusi yang lebih proaktif terhadap masalah kejahatan (Arief, 2011).

Pelajaran terkait sumber daya dan kapasitas sistem hukuman juga tidak dapat diabaikan. Sumber daya yang memadai dan infrastruktur yang baik sangat diperlukan untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara efektif dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Pentingnya adaptabilitas dan keterbukaan terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Sistem hukuman yang dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan mengakomodasi nilai-nilai masyarakat akan lebih dapat memenuhi tuntutan keadilan yang berkembang. Dengan mengambil pelajaran ini secara serius, perbaikan sistem hukuman dapat bergerak menuju arah yang lebih progresif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Sistem hukuman pidana di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda mencerminkan variasi pendekatan yang mencolok. Di Amerika Serikat, hukuman penjara yang tegas dan fokus pada efek jera menonjol. Terdapat kecenderungan terhadap kebijakan hukuman yang berat, yang menyebabkan masalah kelebihan populasi tahanan dan tingkat kambuhan yang tinggi. Sementara itu, di Inggris, pendekatan rehabilitatif dan *restorative justice* menjadi ciri khas. Sistem ini menempatkan penekanan pada pemulihan terdakwa dan rekonsiliasi dengan korban, dengan penggunaan hukuman penjara yang lebih terukur. Di Belanda, pendekatan *restorative justice* lebih menonjol, dengan penekanan kuat pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hukuman penjara di Belanda diterapkan secara lebih selektif, dan terdapat upaya untuk mengurangi kelebihan populasi tahanan.

Analisis perbandingan ini memberikan potensi perbaikan yang signifikan bagi sistem hukuman di masing-masing negara. Pertama, Amerika Serikat dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengatasi kelebihan populasi tahanan, seperti peninjauan ulang kebijakan hukuman yang terlalu berat dan peningkatan fokus pada rehabilitasi. Selanjutnya, Inggris dapat mengevaluasi keberhasilan pendekatan rehabilitatifnya untuk memastikan bahwa upaya reintegrasi sosial benar-benar efektif, sambil tetap mempertahankan elemen *restorative justice*. Di Belanda, perbaikan potensial melibatkan peningkatan kapasitas rehabilitatif dan pemberdayaan narapidana, sambil memastikan bahwa pendekatan *restorative justice* terus menjadi dasar bagi sistem hukuman.

Dengan saling belajar dari kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, ketiga negara ini dapat merancang reformasi yang lebih holistik dan seimbang, menciptakan sistem hukuman yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

REFERENCES

AGUSTIAN, S. (2021). *Perbandingan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Australia*. repository.unsoed.ac.id. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/9917>

- Arief, B. N. (2011). *Tujuan dan pedoman pemidanaan: Perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara*. Pustaka Magister.
- Bawole, H. Y. A. (2013). Perbandingan Hukum Pengaturan Yurisdiksi Tindak Pidana Siber Di Indonesia Dan Di Afrika Selatan. *Lex Crimen*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3120>
- Chandra, S. D. (2019). *Perbuatan Spionase Melalui Teknologi Informasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Perbandingan Hukum Pidana di Negara Lain*. etd.repository.ugm.ac.id.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/175456>
- Dwiyantama, R. W. H. (2023). Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and*
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijcl/article/view/12359>
- Erlianto, R., Siwi, G. R., & Donri, W. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU DARI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, FILIPHINA, DAN MALAYSIA. *UNES Law Review*. <http://review-unes.com/index.php/law/article/view/212>
- Erlytawati, N. (2015). Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura. *Recidive*.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40548>
- FANGGI, R. (2021). Formulasi Tindak Pidana Pengguguran Kandungan dalam Tinjauan Perbandingan Hukum Pidana. Dalam *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*. publikasi.undana.ac.id.
<http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jhy/article/download/h719/511>
- Febriyanti, N. A. (2020). *Melampaui Batas (noodweer Exces) Dalam Membela Diri (studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)*. osf.io. <https://osf.io/ybqng/download>
- Kristiawanto, D. K., & SH, M. (t.t.). Perbandingan Hukum Pidana (MH) Ganjil 2021/2022: BAP, daftar hadir, daftar nilai. Dalam *Repo.jayabaya.ac.id*.
<http://repo.jayabaya.ac.id/1805/1/Perbandingan%20Hukum%20Pidana%20MH%20Ganjil%2021-22.pdf>
- Latukau, F. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan). *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 2, 153–164.
- Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*. <http://e-journal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/494>
- Masduqi, A. (2016). Sejarah Eropa Pada Abad Ke-19. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 69–86.
- Maulana, H. (2016). *Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*. repository.ar-raniry.ac.id. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5715/>
- Mayasari, C. P. (t.t.). Tinjauan Yuridis Euthanasia dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan Hukum Pidana di Beberapa Negara). *neliti.com*.
<https://www.neliti.com/publications/212870/tinjauan-yuridis-euthanasia-dalam-hukum-pidana-studi-perbandingan-hukum-pidana-d>
- MH, M. (2022). *ST Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Munarif, M., & Arief, H. M. (2022). ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum*
<https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/82>
- Najicha, M. D. U. F. U. (t.t.). *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan: Implementasi Hukum dan Prinsip-Prinsip Pancasila sebagai Panduan Moral dan Etika*. Diambil 18 Januari 2024, dari https://www.researchgate.net/profile/Mochammad-Ulhaq/publication/376900333_Implementasi_Perlindungan_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Pema

- nfaatan_Teknologi_Kecerdasan_Buatan_Implementasi_Hukum_dan_Prinsip-Prinsip_Pancasila_sebagai_Panduan_Moral_dan_Etika/links/658eb7882468df72d3e63f7b/Implementasi-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-dalam-Pemanfaatan-Teknologi-Kecerdasan-Buatan-Implementasi-Hukum-dan-Prinsip-Prinsip-Pancasila-sebagai-Panduan-Moral-dan-Etika.pdf
- Nasar, M. (2020). *PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DENGAN KUHP MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN*. osf.io. <https://osf.io/ewsuj/download>
- Pamungkas, B. P. (2023). Reformasi Hukum Acara Pidana Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan Dalam Mengatasi Kriminalitas. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/83>
- Pohan, A., Santoso, T., & Moerings, M. (2012). Hukum pidana dalam perspektif. *Bali: Pustaka Larasan*. <https://core.ac.uk/download/pdf/20261756.pdf>
- Popy, A. (2019). *STUDI KOMPARATIF PENGATURAN CONTEMPT OF COURT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA INGGRIS* [PhD Thesis, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/52884/>
- Prahassacitta, V. (2017). Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyusunan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss4/1/>
- Rochman, S., Akmal, H., & ... (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam. ... *Syariah Dan Hukum*. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2080>
- Saputra, K. T., Liyus, H., & ... (2023). Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of ...* <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24164>
- Sihaloho, H. (2021). Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Respublica*. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/8315>
- Sitanggang, R. (t.t.). ... Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Dengan Cara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Penelitian Di ... *eprints.pancabudi.ac.id*. <https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/1192/>
- Suleaman, A. (2018). *Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam*. repository.uir.ac.id. <http://repository.uir.ac.id/3851/>
- Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Kodifikasi*. <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1843>
- Syahrum, S. M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hNFIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=AXJTCBhni8&sig=W3gXNzjsjhsbWGc5HF4ZZhjaww>
- Tarigan, I. S. (2018). Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam *Universitas Sumatra Utara*. [download.garuda.kemdikbud.go.id](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433430&val=4136&title=KAJIAN%20PERBANDINGAN%20HUKUM%20PIDANA%20TENTANG%20SISTEM%20PENUNTUTAN%20PERKARA%20PIDANA%20MENURUT%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20INDONESIA%20DAN%20AMERIKA%20SERIKAT)
- Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=F7QkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Period+Kuno+Sistem+peradilan+pidana+pertama+&ots=deAB5nAWns&sig=UyEwZOR9mS_UuWlCzrL8V-ZahjE

WARIS, H. K. D. H. (2012). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2013/04/hukum-tentang-orang-family-law.pdf>